



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM

Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai V, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710; Telepon: 021-3449230 Psw. 5632,
(021) 3812767; Faksimile (021) 3812767; Laman: www.blu.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-170/PB.5/2026

9 September 2026

Sifat : Segera

Lampiran : Tiga Berkas

Hal : Permintaan Dokumen dalam rangka Pemenuhan Penilaian BLU Performance Metrics Kategori Kepatuhan (Compliance)

Yth. Para Pemimpin BLU (terlampir)

Sehubungan dengan pelaksanaan penilaian tata kelola dan kinerja Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 76 tahun 2025, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana kami sampaikan pada surat sebelumnya Nomor S-48/PB.5/2026 tanggal 12 Maret 2026 hal Penundaan Pelaksanaan Self-Assesment BLU SMART, saat ini kami dalam tahap penyempurnaan regulasi dan sistem aplikasi penilaian tata kelola dan kinerja (tingkat maturitas) BLU menuju format **BLU Performance Report**.
2. Adapun dalam rangka penyempurnaan menuju format BLU Performance Report, terdapat perubahan substansi dan mekanisme pelaksanaan penilaian tingkat maturitas BLU yang mencakup **tiga (3) kategori utama**, yaitu:

a. Kepatuhan (Compliance)

Penilaian tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan lain yang mengatur pedoman pengelolaan keuangan negara yang berlaku yang terdiri dari aspek **Kepatuhan Administratif dan Pelaksanaan Fleksibilitas**.

b. Tata Kelola (Governance)

Penilaian tingkat kedalaman proses yang diukur dari input maupun output yang mendeskripsikan tata kelola secara keseluruhan, terdiri dari aspek **Kapabilitas Internal, Tata Kelola dan Kepemimpinan, Inovasi, serta Lingkungan**.

c. Kinerja (Performance)

Penilaian pada kategori kinerja (performance) yaitu penilaian capaian kinerja terhadap target dan/atau standar minimal nilai yang telah ditetapkan pada setiap indikator pengukuran yang bersifat kuantitatif. Penilaian pada kategori kinerja mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BLU khususnya terkait **persyaratan teknis satker BLU, yaitu kinerja keuangan sehat dan kinerja pelayanan umum** layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui penetapan sebagai BLU.

3. Dapat kami informasikan bahwa Direktorat PPKBLU telah **menyelesaikan penyempurnaan instrumen penilaian pada kategori Kepatuhan (*Compliance*)**. Sehubungan dengan proses penyempurnaan kategori Tata Kelola (*Governance*) dan Kinerja (*Performance*) yang masih berlangsung, **pelaksanaan penilaian tahun 2026 akan dimulai dengan penilaian kategori Kepatuhan (*Compliance*) atas pelaksanaan kepatuhan tahun 2025**. Adapun penilaian kategori Kepatuhan meliputi 2 (dua) aspek dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Kepatuhan Administratif

Penilaian **kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban administratif selama 2 (dua) tahun terakhir** sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan lain yang mengatur pedoman pengelolaan keuangan negara yang berlaku, melalui indikator: **laporan pelaksanaan tarif, RBA indikatif, RBA definitif, revisi RBA definitif, RSB, laporan pengelolaan rekening dan investasi, laporan keuangan audited, bebas kasus fraud, laporan pemeriksaan eksternal, laporan dewan pengawas, dan/atau indikator lain yang ditetapkan oleh Direktorat PPK BLU.**

b. Pelaksanaan Fleksibilitas

Penilaian atas **kepatuhan BLU dalam menerapkan kewenangan/fleksibilitas pengelolaan keuangan pada tahun berjalan**, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan pelaksanaan lainnya yang berlaku. Penilaian mencakup 4 (empat) indikator utama, yaitu pengelolaan kas, pengelolaan investasi jangka pendek, pengelolaan aset, dan pengelolaan piutang.

4. Penilaian kategori Kepatuhan (*Compliance*) terhadap aspek **Kepatuhan Administratif** dilakukan langsung oleh Tim Penilai Direktorat PPK BLU berdasarkan dokumen yang telah diunggah oleh BLU pada aplikasi BIOS (*BLU Integrated Online System*). Penilaian difokuskan pada kriteria kesesuaian substansi, kelengkapan dokumen, dan ketepatan waktu penyampaian.
5. Selanjutnya, untuk penilaian kategori Kepatuhan (*Compliance*) pada aspek **Pelaksanaan Fleksibilitas**, Pemimpin BLU diminta untuk menyiapkan dokumen bukti dukung dan informasi pendukung secara lengkap sesuai dengan kriteria indikator yang tercantum dalam **Kertas Kerja Penilaian Fleksibilitas sebagaimana terlampir**.
6. Adapun **tahapan dan petunjuk teknis penyampaian dokumen bukti dukung/informasi aspek Pelaksanaan Fleksibilitas** adalah sebagai berikut:
- Mengunduh Kertas Kerja Penilaian Fleksibilitas sebagaimana tercantum pada **Lampiran III** surat ini;
 - Melakukan identifikasi, inventarisasi, dan penyiapan dokumen bukti dukung sesuai tingkat pemenuhan (*leveling*) pada setiap indikator indikatif dalam kertas kerja;
 - Mengunggah (*upload*) seluruh dokumen bukti dukung sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam folder penyimpanan online (seperti *Google Drive*, *OneDrive*, atau sejenisnya)

milik Satker dan memastikan pengaturan hak akses folder telah dibuka/dapat diakses oleh Tim Penilai (*public link / anyone with the link can view*);

- d. Mengisi Kertas Kerja Penilaian Fleksibilitas serta menyantumkan tautan (*link*) penyimpanan dokumen online (huruf c) pada kolom yang telah disediakan dalam kertas kerja;
 - e. Menamai berkas Kertas Kerja yang telah diisi dengan format penamaan: **[Kode Satker]_[Nama Satker]_KK Penilaian Fleksibilitas** (contoh: 654342_Universitas ABC_KK Penilaian Fleksibilitas);
 - f. Mengunggah (upload) berkas Kertas Kerja dalam bentuk softcopy (format Excel/PDF) melalui tautan resmi: <https://s.kemenkeu.go.id/PenilaianFleksibilitas2025>
 - g. Berkoordinasi secara aktif dengan Pembina Keuangan di Direktorat PPK BLU untuk mengonfirmasi kelengkapan serta memastikan pemenuhan indikator pada setiap tingkat capaian. Untuk monitoring penyampaian Kertas Kerja Fleksibilitas dapat diakses melalui tautan s.kemenkeu.go.id/KKFleksibilitas.
7. Kertas kerja yang telah dilengkapi beserta seluruh lampiran bukti dukung sebagaimana tercantum pada poin 6 diharapkan dapat diunggah/kami terima **paling lambat pada tanggal 14 September 2026**. Mengingat pentingnya keamanan dan kerahasiaan data, mohon Pemimpin BLU memastikan tautan penyimpanan online yang disampaikan hanya difungsikan khusus untuk kepentingan penilaian ini serta dikelola secara aman.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pembinaan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum



Ditandatangani secara elektronik
Meirijal Nur

Tembusan:
Para Pembina Teknis BLU (terlampir)



Yth. Pemimpin BLU

Kementerian Keuangan (015)

1. Politeknik Keuangan Negara STAN

Kementerian Perindustrian (019)

1. Politeknik AKA Bogor
2. Politeknik STTT Bandung
3. Politeknik STMI Jakarta
4. Politeknik APP Jakarta

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (020)

1. Politeknik Energi dan Mineral AKAMIGAS
2. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi
3. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara
4. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (023)

1. Universitas Mulawarman
2. Universitas Lampung
3. Universitas Gorontalo
4. Universitas Bengkulu
5. Universitas Jenderal Soedirman
6. Universitas Haluoleo
7. Universitas Udayana
8. Universitas Riau
9. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten
10. Universitas Mataram
11. Universitas Tadulako
12. Universitas Pendidikan Ganesha
13. Universitas Nusa Cendana
14. Universitas Jambi
15. Universitas Sam Ratulangi
16. Universitas Tanjungpura
17. Universitas Negeri Medan
18. Universitas Pattimura, Ambon
19. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
20. Universitas Negeri Makassar
21. Universitas Jember
22. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
23. Universitas Singaperbangsa Karawang
24. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
25. Universitas Khairun
26. Universitas Negeri Manado



27. Universitas Lambung Mangkurat
28. Politeknik Negeri Malang
29. Politeknik Manufaktur Bandung
30. Politeknik Negeri Semarang
31. Politeknik Negeri Jakarta
32. Politeknik Negeri Bali
33. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
34. Politeknik Negeri Ujung Pandang
35. Politeknik Negeri Bandung
36. Politeknik Negeri Medan
37. Universitas Trunodjoyo Madura
38. Institut Seni Indonesia Padang Panjang
39. Universitas Palangkaraya
40. Universitas Cendrawasih
41. Universitas Malikussaleh
42. Politeknik Negeri Sriwijaya
43. Politeknik Negeri Jember
44. Politeknik Negeri Pontianak
45. Politeknik Negeri Batam
46. Universitas Bangka Belitung
47. Universitas Siliwangi
48. Institut Seni Indonesia Surakarta
49. Universitas Tidar
50. Universitas Musamus
51. Politeknik Negeri Padang
52. Politeknik Negeri Lampung
53. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Kementerian Kesehatan (024)

1. Politeknik Kesehatan Jakarta III
2. Politeknik Kesehatan Bandung
3. Politeknik Kesehatan Medan
4. Politeknik Kesehatan Semarang
5. Politeknik Kesehatan Makassar
6. Politeknik Kesehatan Jakarta II
7. Politeknik Kesehatan Surabaya
8. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang
9. Politeknik Kesehatan Surakarta
10. Politeknik Kesehatan Malang
11. Politeknik Kesehatan Pontianak
12. Politeknik Kesehatan Yogyakarta
13. Politeknik Kesehatan Bengkulu
14. Politeknik Kesehatan Padang
15. Politeknik Kesehatan Jambi
16. Politeknik Kesehatan Palembang
17. Politeknik Kesehatan Denpasar
18. Politeknik Kesehatan Tasikmalaya
19. Politeknik Kesehatan Mataram

20. Politeknik Kesehatan Kupang
21. Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur
22. Politeknik Kesehatan Banjarmasin
23. Politeknik Kesehatan Manado
24. Politeknik Kesehatan Palu
25. Politeknik Kesehatan Palangkaraya
26. Politeknik Kesehatan Aceh
27. Politeknik Kesehatan Maluku
28. Politeknik Kesehatan Banten
29. Politeknik Kesehatan Riau
30. Politeknik Kesehatan Gorontalo
31. Politeknik Kesehatan Kendari
32. Politeknik Kesehatan Sorong
33. Politeknik Kesehatan Jayapura
34. Politeknik Kesehatan Jakarta I

Kementerian Agama (025)

1. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
2. UIN Raden Fatah Palembang
3. UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
4. UIN Walisongo Semarang
5. UIN Sumatera Utara
6. UIN Sultan Syarif Kasim Riau
7. UIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi
8. UIN Sunan Ampel Surabaya
8. UIN Sunan Gunung Djati, Bandung
9. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
10. UIN Mataram
11. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
12. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
13. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
14. UIN Imam Bonjol Padang
15. UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
16. UIN Salatiga
17. IAIN Syekh Nurjati Cirebon
18. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
19. UIN Alauddin Makassar
20. IAIN Palopo
21. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
22. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
23. UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
24. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
25. UIN Mahmud Yunus Batusangkar
26. UIN Raden Intan Lampung
27. UIN Raden Mas Said Surakarta

Kementerian Kelautan dan Perikanan (032)

1. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal
2. Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo

Yth. Para Pembina Teknis BLU

Kementerian Keuangan (015)

1. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan

Kementerian Perindustrian (019)

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perindustrian
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Kementerian Perindustrian

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (020)

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (139)

1. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Kementerian Kesehatan (024)

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan

Kementerian Agama (025)

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama
2. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal, Kementerian Agama

Kementerian Kelautan dan Perikanan (032)

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KP, Kementerian Kelautan dan Perikanan

